

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH
2024

*Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu*

www.pulauseribu.jakarta.go.id

Jl. Ikan Baracuda,
Pulau Pramuka - Jakarta



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2024 ini merupakan media pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Administrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membantu Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban tentang keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2024 tentang pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

Pelaporan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dimaksud, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kinerja yang telah diwujudkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara akurat, relevan, transparan dan akuntabel.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan, maupun bentuk kontribusi lainnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi pengelolaan, penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat Kepulauan Seribu.

Jakarta, 30 Januari 2025
Plt. Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,



M. Fadjar Churniawan, S.E., M.Si.
NIP. 197205041998031007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terbagi menjadi aspek Sasaran Strategis, Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional. Pencapaian ketiga sasaran tersebut sangat membanggakan. Pada aspek Sasaran Strategis sebanyak 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan, Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan berhasil melampaui target dengan rata-rata sebesar 101,44%, lalu 9 (sembilan) Indikator Sasaran Khusus berhasil mencapai nilai rata-rata sempurna sebesar 105,03%, dan terakhir 3 (tiga) Indikator Sasaran Operasional mencapai nilai sempurna dengan capaian 100%. Selain itu, terdapat 14 (empat belas) Program yang secara khusus mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama. Menariknya, baik Indikator Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Khusus, maupun Indikator Sasaran Operasional memiliki karakteristik sebagai Indikator-Indikator yang berdiri sendiri, memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung keseluruhan pencapaian kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Dalam pelaksanaan 14 (empat belas) program pada tahun 2024 tersebut, total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 202.442.354.727. Realisasi dana tersebut mencapai angka sebesar Rp 192.491.681.771, dengan capaian nilai efisiensi sebesar 4,97%. Hal ini menunjukkan ketepatan dan pengelolaan yang efisien dalam alokasi dana, sekaligus menekankan komitmen untuk memastikan pemanfaatan anggaran dengan

optimal dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan setiap program yang dijalankan.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan keempat IKU tersebut di atas adalah sebagai berikut, yang pertama Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi yaitu kualitas layanan yang tidak konsisten dan ketidakseimbangan fasilitas dan infrastruktur. IKU yang kedua Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan dengan kendala keterbatasan sumber daya manusia, IKU yang ketiga Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi dengan kendalanya adalah kurangnya komunikasi dan informasi, dan IKU yang keempat adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan kendalanya adalah tidak memberikan edukasi atau sosialisasi yang cukup kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pelimpahan kewenangan sehingga dapat menyulitkan pemahaman mereka terhadap perubahan tersebut.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Bab 1 : Pendahuluan	1
Latar Belakang.....	1
Tujuan dan Manfaat	2
Dasar Hukum.....	3
Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	4
Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	5
Personil Sumber Daya Manusia	8
Tugas dan Fungsi	9
Aspek Strategis	10
Sistematika Penulisan	12
Rekomendasi dan Tindak Lanjut Inspektorat	12

Bab 2 : Perencanaan Kinerja Tahun 2024	14
Pernyataan Visi	14
Perjanjian Kinerja	15
Tujuan dan Sasaran	38
Bab 3 : Akuntabilitas Kinerja	40
Capaian Kinerja	40
Analisa Capaian Kinerja	58
Faktor-faktor Keberhasilan dan Tantangan	83
Pemanfaatan Capaian Kinerja Terhadap Sumber Daya Manusia.....	86
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)	87
Program/Kegiatan Strategis Yang Menunjang Keberhasilan	94
Realisasi Anggaran	105
Bab 4 : Penutup	112
Kesimpulan	113
Lampiran-lampiran	113

BAB

1

Pendahuluan

Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dikatakan berhasil jika mampu mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita yang diharapkan dengan menerapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik / *good governance*. *Good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan publik *goods and services* dimana praktek terbaiknya disebut *good governance*. Agar *good governance* dapat diwujudkan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. *Good governance* menuntut koordinasi yang baik dan profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai Instansi Pemerintah memiliki tugas dan fungsi utama memberikan pelayanan kepada masyarakat (publik/ stakeholder) Kepulauan Seribu. Secara periodik pemerintah harus dapat mempertanggungjawabkan hasil atas kinerja yang telah dilaksanakannya selama satu tahun anggaran. Laporan Kinerja disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja diharapkan juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Masyarakat Kepulauan Seribu mengharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Penambahan anggaran yang dikeluarkan dari

tahun-ketahun, harus dapat menjamin tingginya kepuasan masyarakat atas kualitas jasa maupun barang yang diberikan ataupun disediakan oleh pemerintah. Mekanisme pengukuran kinerja dengan penekanan pada kemampuan menyerap anggaran sudah tidak ideal lagi saat ini apabila dibandingkan dengan hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut dimana pada kenyataannya masih berada jauh di bawah tingkat yang diinginkan.

Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengukur semua program satuan kerja tetapi lebih ditekankan kepada keluaran atau manfaat dan dampak dari program tersebut bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu. Dalam perspektif yang lebih luas, Laporan Kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh pejabat dan staf serta partisipasi masyarakat.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024 adalah sebagai media untuk mendapatkan masukan stakeholder dengan memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan untuk perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu. Melalui identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja, diharapkan dapat menjadi masukan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Sehingga laporan kinerja dapat menjadi proses evaluasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam pelayanan publik.

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
8. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Gambaran Umum

Pemerintah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

Kepulauan Seribu terdiri atas gugusan pulau - pulau kecil yang berjumlah 110 pulau dengan luas daratan 871,23 ha. Dari 110 pulau, hanya 11 pulau yang berpenduduk, sementara 98 pulau lainnya merupakan pulau tidak berpenduduk yang berupa pulau milik pribadi, resort, cagar alam, wisata bahari, dan lain – lain.

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2001 tentang pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Geografis

Kepulauan Seribu secara geografis terletak antara 106°25' – 106°4'BT dan 5°24' – 5°45'LS dengan Luas wilayah Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu luas wilayah 871,23 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Timur Laut Jawa
- Sebelah Utara Laut Jawa
- Sebelah Selatan Kecamatan Cengkareng, Penjaringan, Tanjung Priok, Koja dan Tangerang Barat
- Sebelah Barat Laut Jawa dan Selat Sunda

Topografis

Wilayah Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagian besar terdiri dari perairan / lautan dan gugusan pulau - pulau kecil yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ±2 meter di atas permukaan laut, luas daratan terutama di sepanjang pantai.

Wilayah Administratif

Secara administratif, wilayah Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terbagi menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu: Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Serta terdapat 6 (enam) kelurahan yaitu: Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kelurahan Pulau Tidung, Kelurahan Pulau Pari, Kelurahan Pulau Panggang, Kelurahan Pulau Kelapa dan Kelurahan Pulau Harapan.

Sejalan dengan penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah, saat ini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terdapat 15 (tiga belas) suku dinas, 3 (tiga) suku badan, 4 (empat) unit pelayanan/penyelenggara/pengelola dan 3 (tiga) instansi vertikal.

Penduduk

Jumlah penduduk Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berkisar 30.414 jiwa lebih dengan tingkat kepadatan rata-rata mencapai 2.836 jiwa per km². Jika dilihat dari tingkat penyebarannya, yang tertinggi terdapat di Kecamatan Seribu Utara dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Seribu Selatan dari total penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

Dalam rangka menata organisasi di Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka telah disusun Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Kabupaten Administrasi merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintahan Daerah di wilayah Kabupaten Administrasi, dipimpin oleh seorang Bupati yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Sekretaris Daerah. Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah dan Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Bupati. Kabupaten Administrasi melaksanakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan sebagian tugas pemerintahan yang dilimpahkan dari Gubernur dan selain itu dalam melaksanakan tugas tambahan SKPD di Kabupaten Administrasi berpedoman kepada arahan dan kebijaksanaan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka susunan organisasi Kabupaten Administrasi terdiri dari :

1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
3. Sekretariat Kabupaten, terdiri dari:
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Bina Pemerintahan
 - 2) Sub Bagian Tata Praja dan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - b) Bagian Hukum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian.
 2. Asisten Perekonomian, Administrasi dan Pembangunan terdiri dari :
 - a) Bagian Umum dan Protokol, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Protokol
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan.

- b) Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Keuangan.
 - c) Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
4. Unit Kerja Teknis 1, terdiri dari:
- a) Seksi Sosial
 - b) Seksi Pemuda dan Olahraga
 - c) Seksi Perpustakaan dan Kearsipan
5. Unit Kerja Teknis 2, terdiri dari:
- a) Seksi Pencahayaan Kabupaten
 - b) Seksi Pertamanan dan Hutan Kota
 - c) Seksi Bina Marga
6. Kecamatan, terdiri dari:
- a) Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Umum
 - 2) Subbagian Program dan Anggaran
 - 3) Subbagian Keuangan
 - b) Seksi Pemerintahan
 - c) Seksi Kesejahteraan Rakyat
 - d) Seksi Ekonomi dan Pembangunan
 - e) Kelurahan, terdiri dari
 - 1) Lurah
 - 2) Sekretariat Kelurahan
 - 3) Seksi Pemerintahan
 - 4) Seksi Kesejahteraan Rakyat
 - 5) Seksi Ekonomi dan Pembangunan
7. Kelompok Jabatan Fungsional
- a) Ketua Sub Kelompok Hukum
 - b) Ketua Sub Kelompok Tatalaksana dan Pelayanan Publik
 - c) Ketua Sub Kelompok Kepegawaian

- d) Ketua Sub Kelompok Program dan Pelaporan
- e) Ketua Sub Kelompok Kesejahteraan Rakyat
- f) Ketua Sub Kelompok Perekonomian
- g) Ketua Sub Kelompok Pembangunan

Personil / Sumber Daya Manusia

Adapun jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan pejabat struktural dan fungsional dari Sekretariat Kabupaten serta pejabat struktural dari Kecamatan dan Kelurahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Sumber Daya Manusia Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024

SKPD	Jumlah (orang)	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah (orang)	Pangkat	Jumlah (orang)
Kabupaten	159	SMP	1	II/a	2
		SMA	35	II/b	9
		D3	19	II/c	17
		S1	89	II/d	14
		S2	14	III/a	34
		S3	1	III/b	28
				III/c	19
				III/d	25
				IV/a	11
				IV/b	2
				IV/c	2
				IV/d	

Tugas dan Fungsi

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang dipimpin oleh Bupati mempunyai tugas sebagai berikut :

1. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Kabupaten Administrasi;
2. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Administrasi
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;
4. pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya;
5. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
6. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
7. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
8. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
9. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kabupaten Administrasi;
10. pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kabupaten Administrasi;
11. pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
12. pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Administrasi;
13. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kabupaten Administrasi;
14. pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kabupaten;
15. fasilitasi pengelolaan KORPRI Kabupaten Administrasi;

16. pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kabupaten Administrasi;
17. pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital informasi Kabupaten Administrasi;
18. pelaksanaan kesekretariatan Kabupaten Administrasi;
19. fasilitasi pengkoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD;
20. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi; dan
21. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Aspek Strategis

Adapun dalam mewujudkan visi dan misi tersebut tidak lepas dari berbagai permasalahan dan kendala, antara lain:

1. Sebagai wilayah kepulauan, terdapat keterbatasan infrastruktur yang mendukung pelayanan publik, seperti akses transportasi antar-pulau, jaringan komunikasi yang kurang merata, dan fasilitas kesehatan serta pendidikan yang masih terbatas. Hal ini sering kali memperlambat pelaksanaan program-program strategis;
2. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai wilayah kepulauan menghadapi tantangan besar dalam distribusi program gizi. Jarak antar-pulau dan terbatasnya sarana transportasi sering kali menyebabkan keterlambatan pengiriman bahan makanan bergizi, seperti susu, vitamin, dan bahan pokok lain untuk ibu hamil dan anak-anak;
3. Pengembangan pariwisata berbasis ekowisata di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menghadapi kendala utama dalam keterbatasan infrastruktur yang ramah lingkungan, seperti pengelolaan limbah yang belum optimal di beberapa pulau

wisata, serta fasilitas publik yang masih minim untuk mendukung konsep ekowisata. Selain itu, kesadaran masyarakat lokal terhadap praktik pariwisata berkelanjutan masih rendah, sehingga pemberdayaan mereka sebagai pelaku utama sering terhambat oleh kurangnya pelatihan dan edukasi yang memadai.;

4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menghadapi beberapa kendala konkrit, seperti akses permodalan yang terbatas bagi pelaku UMKM dan koperasi, serta distribusi hasil perikanan dan produk olahan laut yang terkendala oleh infrastruktur transportasi yang belum memadai. Selain itu, kurangnya pelatihan keterampilan yang spesifik dan berkelanjutan mengakibatkan kemampuan masyarakat dalam mengolah potensi lokal tidak optimal, sehingga daya saing produk lokal masih rendah di pasar yang lebih luas;
5. Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menghadapi sejumlah kendala konkret, terutama dalam pengelolaan sampah yang masih terkendala oleh terbatasnya fasilitas pengolahan sampah terpadu dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan limbah secara berkelanjutan;
6. Peningkatan infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menghadapi beberapa kendala konkret, seperti keterbatasan anggaran untuk pembangunan dermaga yang memadai di semua pulau, sehingga aksesibilitas antar-pulau masih belum optimal. Sarana transportasi laut juga sering terkendala oleh minimnya jumlah kapal reguler dan kondisi cuaca yang ekstrem, yang berdampak pada gangguan mobilitas penduduk dan wisatawan;
7. Penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menghadapi kendala konkret, seperti keterbatasan lahan yang membuat implementasi program urban farming dan akuakultur kurang maksimal. Pemanfaatan lahan terbatas sering kali terhambat oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai teknik budidaya modern, seperti hidroponik atau akuaponik, yang sesuai dengan kondisi geografis wilayah pesisir.

Sistematika Penulisan

Penyusunan LKIP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024 mempunyai Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan berisi penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan, landasan hukum pembentukan, maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja, gambaran umum singkat SKPD sesuai SOTK baru serta sistematika laporan.

BAB II : Pernyataan Visi dan Misi, menyajikan secara ringkas Rencana Strategis, Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja.

BAB III : Capaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja, Pengaruh Capaian Kinerja terhadap Budaya Organisasi, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program dan Kegiatan Strategis yang menunjang Keberhasilan, Realisasi Anggaran dan Faktor penunjang keberhasilan dan penghambat.

BAB IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan, saran, tindak lanjut serta lampiran hasil menyeluruh dari Laporan Kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Inspektorat

Dalam rangka menyempurnakan laporan LKIP serta meningkatkan capaian kinerja pada waktu yang akan datang, maka berikut adalah rekomendasi berdasarkan pada hasil evaluasi LKIP tahun 2023 yang lalu serta tindak lanjut yang telah dilakukan pada penyusunan LKIP tahun 2024 ini :

1. Memaksimalkan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berdasarkan asas *the right man on the right place*;
2. Membuat rencana aksi untuk setiap indikator kinerja agar dapat melihat progress per triwulan serta mencegah tidak tercapainya indikator kinerja;
3. Rutin melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi setiap indikator kinerja agar capaian dari kinerja bisa maksimal.

Tindak lanjut terhadap saran-saran yang telah diberikan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta pada LKIP tahun sebelumnya mencakup sejumlah langkah konkret dalam penyempurnaan Dokumen Laporan Kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, yaitu

1. Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah mengusulkan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan untuk jabatan Struktural dan Fungsional;
2. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah menyusun Rencana Aksi setiap triwulannya agar progresnya dapat dipantau dan dievaluasi serta menjadi langkah konkrit tercapainya indikator kinerja;
3. Setiap Triwulan telah dilaksanakan rapat monitoring dan evaluasi kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan mengundang para pengampu Indikator Kinerja Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

BAB **2** **Perencanaan Kinerja** **Tahun 2024**

Pernyataan Visi

Sebagai pemberi arah dalam melaksanakan kegiatan di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, perlu ditetapkan bersama suatu pandangan ke depan (*vision*) yang akan menjadi sumber motivasi dan inovasi dinamis dalam mewujudkan berbagai bentuk pelayanan publik yang prima. Gambaran ke depan yang dimaksud dirumuskan dalam bentuk visi, misi, tujuan dan sasaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Visi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah :

“Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya Terlibat Dalam Mewujudkan Keberadaban dan Kesejahteraan Bagi Semua”

Sebagai suatu lembaga pemerintah yang merupakan perwakilan dari Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu membawa visi Gubernur yang ketiga yaitu Kesejahteraan Bagi Semua. Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua masyarakat, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan sosial lainnya, serta peningkatan kualitas hidup melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengemban misi sebagai berikut:

1. Menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan;
2. Menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang;
3. Menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdikan, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas;
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial;
5. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.
6. Menjadikan Jakarta ibukota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yaitu sebuah kesepakatan yang dibuat antara Bupati dengan Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai tujuan bersama dalam jangka waktu tertentu. Dalam perjanjian ini, Bupati bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang ditentukan dalam perjanjian. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, serta untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Perjanjian Kinerja tahun 2024 ini mengalami perubahan target dari yang telah ditetapkan dalam

Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, hal ini disebabkan capaian beberapa indikator pada tahun 2023 telah melampaui target yang ada di Renstra. Sesuai dengan *framework* SMART-C maka target disusun dengan mempertimbangkan capaian di tahun sebelumnya, perubahan ini berdasarkan Instruksi Sekda Nomor 19 Tahun 2024.

Indikator Kinerja tersebut pelaksanaannya tidak sepenuhnya bergantung pada ketersediaan anggaran sehingga apabila anggarannya berkendala sekalipun maka indikator tersebut masih tetap dapat diukur *output* dan *outcomenya*. Indikator kinerja yang realisasinya tidak bergantung pada ketersediaan anggaran mayoritas sebagian besar merupakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang pelaksanaannya bersifat koordinatif. Berdasarkan Perjanjian Kinerja ini kemudian dilakukan Penetapan Perjanjian Kinerja yang menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam suatu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja dan merupakan *benchmark* bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Sebagai penjabaran lebih lanjut, maka seluruh indikator kinerja diatas akan dijelaskan secara detail pada tabel selanjutnya dan juga jumlah anggaran pada program-program yang diampu.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2024	Target Renstra	Persentase Perubahan
Indikator Strategis						
1	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	<p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Definisi :</p> <p>Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang unsur Kabupaten Administrasi</p>	89,015	87,33	1.9%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2024	Target Renstra	Persentase Perubahan
			Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Efektifitas Koordinasi dan pelimpahan kewenangan yang dilakukan melalui Jaksurvei			
2	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survei diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM).	91,285	88,6	3,03%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2024	Target Renstra	Persentase Perubahan
			<p>Metode Pengukuran :</p> <p>Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut:</p> <p>a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25.00 – 64,99;</p> <p>b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65.00 – 76,60;</p> <p>c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30;</p> <p>d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00.</p> <p>Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM).</p> <p>Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei</p>			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2024	Target Renstra	Persentase Perubahan
			<p>adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi</p> <p>Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui Jaksurvei</p>			
3	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi	<p>Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Definisi Operasional : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat.</p> <p>Metode Pengukuran : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kabupaten Administrasi didapatkan melalui agregat hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi pada bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, serta bidang administrasi, ekonomi, dan pembangunan., dengan responden Kepala UKPD di masing-masing</p>	87,25	86	1,45%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2024	Target Renstra	Persentase Perubahan
			<p>Kota/Kabupaten Administrasi, dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi</p> <p>Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Efektifitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksurvei</p>			
4	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan (Rerata)	<p>Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>Definsi Operasional : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survei diantaranya adalah urusan yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; Urusan</p>	90,36	88,6	1,9%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2024	Target Renstra	Persentase Perubahan
			<p>Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; serta Unsur Kepegawaian.</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut:</p> <p>a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25.00 – 64,99;</p> <p>b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65.00 – 76,60;</p> <p>c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30;</p> <p>d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00.</p> <p>Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei minimal 100 orang. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang</p>			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2024	Target Renstra	Persentase Perubahan
			<p>kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM) dalam rangka mendukung Bidang urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.</p> <p>Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan melalui Jaksurvey.</p>			
Indikator Khusus						
5	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	<p>Definisi :</p> <p>a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.</p> <p>b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.</p> <p>c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi.</p> <p>d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.</p> <p>Metode Pengukuran:</p> <p>a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah.</p> <p>b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui</p>	100%	-	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2024	Target Renstra	Persentase Perubahan
			<p>media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.</p> <p>c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi.</p> <p>d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.</p>			
6	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Nilai kualitas data SDI	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi</p> <p>b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024</p> <p>Definisi :</p> <p>Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu:</p> <p>a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</p> <p>b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</p> <p>c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata.</p>	3,25	-	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2024	Target Renstra	Persentase Perubahan
			<p>d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data</p> <p>Formula Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)]</p> <p>(Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4)</p> <p>Keterangan :</p> <p>a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketentuan)</p> <p>b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketentuan)</p> <p>c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketentuan)</p> <p>d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketentuan)</p> <p>Catatan :</p> <p>1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p>			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2024	Target Renstra	Persentase Perubahan
			<p>2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta</p>			
7	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> <p>b. Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah</p> <p>Definisi: Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei Atas Kinerja Walikota/bupati, Camat dan Lurah pada wilayah masing-masing</p> <p>Metode Pengukuran: Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jaksurvei</p>	92	-	-
8	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang	<p>Definisi: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.</p>	100%	-	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2024	Target Renstra	Persentase Perubahan
		dan/atau Kuasa Pengguna Barang	<p>Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB</p> <p>Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi:</p> <p>a. Bobot 5% PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD</p> <p>b. Bobot 85% PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki</p> <p>c. Bobot 10% PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)</p>			
9	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan</p> <p>d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan</p>	100%	-	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2024	Target Renstra	Persentase Perubahan
			<p>Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Definisi :</p> <p>a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare)</p> <p>b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening:</p> <p>5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa</p> <p>5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat</p> <p>5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat</p> <p>5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin</p> <p>5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan</p> <p>5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</p> <p>5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</p> <p>5.2.06 - Belanja Modal Lainnya</p>			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2024	Target Renstra	Persentase Perubahan
			<p>Metode Pengukuran :</p> <p>Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan.</p> <p>Sumber Data :</p> <p>a. Bigbox LKPP</p> <p>b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD</p>			
10	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran.</p> <p>b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun.</p> <p>Definisi: Terselesaikannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan</p>	100%	-	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2024	Target Renstra	Persentase Perubahan
			<p>Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklat-bpsdm.jakarta.go.id</p> <p>Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024.</p> <p>Metode Pengukuran : [(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)]</p> <p>Sumber Data : Simdiklat BPSDM dan Pintar BPSDM</p>			
11	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	<p>Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p>Definisi : terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p> <p>Metode Pengukuran : Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5</p>	100%	-	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2024	Target Renstra	Persentase Perubahan
			<p>Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4).</p> <p>Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p>			
12	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:</p> <p>a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan.</p> <p>Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko</p>	100%	-	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2024	Target Renstra	Persentase Perubahan
			<p>Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran : [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada riwulan 4)] x 100%</p> <p>Output Sasaran : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV</p> <p>Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan II : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Triwulan IV : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV</p>			
13	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	<p>Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	100%	-	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2024	Target Renstra	Persentase Perubahan
			<p>Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p> <p>Definisi : Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP</p>			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2024	Target Renstra	Persentase Perubahan
			<p>2) Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id</p> <p>3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan.</p> <p>Sumber Data : a) data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.</p> <p>4). Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:</p>			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2024	Target Renstra	Persentase Perubahan
			<p>- dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.</p> <p>Sumber Data : proyeksi APBD</p> <p>Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut:</p> <p>Bp = 9,7%</p> <p>BK = 18,2%</p> <p>Bckk = 43,5%</p> <p>BE = 28,6%</p> <p>Bp : Bobot penyerapan anggaran</p> <p>BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan</p> <p>Bckk : Bobot capaian keluaran</p> <p>BE : Bobot efisiensi</p> <p>Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :</p> <p>≤ 60 = Rendah</p> <p>> 60 s.d 70 = cukup</p> <p>> 70 s.d 90 = Baik</p> <p>> 90 s.d 100 = Sangat Baik</p>			
Indikator Operasional						

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2024	Target Renstra	Persentase Perubahan
14	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	-	-
15	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	-	-
16	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	100%	-	-

Tabel 2.2 Program dan Pagu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024

No	Nama Program	Pagu
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 11.404.502.328
2	Program Penanganan Bencana	Rp. 204.501.697
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp. 10.490.939.211
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 241.318.714
5	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Rp. 493.343.485
6	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 202.013.613
7	Program Pengelolaan Arsip	Rp. 57.046.969
8	Program Kepegawaian Daerah	Rp.39,000,000
9	Program Pengelolaan Kecamatan	Rp. 2.081.747.654
10	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Rp. 935.714.371
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 115.108.713.313
12	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan	Rp. 538.257.970
13	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 1.479.336.296
14	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 484.093.108

Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan pelaksanaan RPD Provinsi DKI Jakarta 2023-2026, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun tujuan dari Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal”

Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.



Untuk dapat mengoperasionalkan tujuan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, maka disusun sasaran dari tujuan tersebut, beserta indikatornya sehingga sasaran tersebut dapat terukur secara tahunan dan dapat menjadi payung bagi pengukuran program dan kegiatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk periode 2023-2026. Gambaran lebih lanjut mengenai keterkaitan tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Utama

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun			
			2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal		Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	87,33	87,33	88,13	88,70
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan	Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi	85	86	87	88,5

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun			
			2023	2024	2025	2026
	Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	88,5	88,6	88,7	88,8
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	88,5	88,6	88,7	88,8

BAB 3

Data Capaian Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja yang disajikan dalam bagian ini menjelaskan tentang capaian indikator kinerja organisasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 terdapat 32 (Tiga Puluh Dua) Indikator Kinerja yang terbagi menjadi Sasaran Strategis, Sasaran Operasional dan Sasaran Khusus. Sasaran Strategis memuat Indikator Kinerja antara lain :

- Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi (10 Indikator);
- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan;
- Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi (2 Indikator);
- Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan (7 Indikator);

Kemudian pada Sasaran Khusus memuat Indikator Kinerja antara lain :

- Strategi Komunikasi;
- Nilai kualitas data SDI;
- Survei Kepuasan Layanan Masyarakat;
- Persentase Inventarisasi BMD;
- Realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri

- Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN;
- Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan;
- Penerapan Manajemen Risiko;
- Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi;

Sedangkan untuk Sasaran Operasional memuat Indikator Kinerja :

- Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur;
- Penyelesaian Tindak Lanjut Aduan Masyarakat;
- Nilai Survey Kepuasan Layanan Masyarakat, Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan BPK.

Pada aspek Sasaran Strategis sebanyak 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan, Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan berhasil melampaui target dengan rata-rata sebesar 101,44%, lalu 9 (sembilan) Indikator Sasaran Khusus berhasil mencapai nilai rata-rata sempurna sebesar 105,03%, dan terakhir 3 (tiga) Indikator Sasaran Operasional mencapai nilai sempurna dengan capaian 100%.

Pada tabel berikut akan dijabarkan masing-masing indikator kinerja dan membandingkan data capaian kinerja Tahun 2024 dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya serta membandingkannya dengan target RPJMD 2023-2026. Dengan adanya perbandingan ini akan memperjelas posisi capaian yang ada di Tahun 2024 dan memberi informasi mengenai trend dari kondisi capaian beberapa tahun sebelumnya.

Tabel 3.1 Perjanjian Kinerja, Realisasi dan Target RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Target RPJMD Tahun Ke-2
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(9)
1	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari,	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari	89,015	93,105	87,78	N/A	87,33

	Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal		survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan bidang unsur Kabupaten Administrasi					
2	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan bidang unsur Kecamatan Administrasi	89,015	93,105	87,78	N/A	87,33
3	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi	89,015	93,105	87,78	N/A	87,33

	Pembangunan Optimal		kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan bidang unsur Kota Administrasi					
4	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan bidang unsur Lingkungan Hidup	89,015	93,105	87,78	N/A	87,33
5	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan bidang unsur kepemudaan dan olahraga	89,015	93,105	87,78	N/A	87,33
6	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata	89,015	93,105	87,78	N/A	87,33

	Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal		pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan bidang unsur Perpustakaan					
7	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan bidang unsur Kearsipan	89,015	93,105	87,78	N/A	87,33
8	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten	89,015	93,105	87,78	N/A	87,33

	Hasil Pembangunan Optimal		administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan bidang unsur Kepegawaian					
9	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan bidang unsur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	89,015	93,105	87,78	N/A	87,33
10	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan bidang unsur Sosial	89,015	93,105	87,78	N/A	87,33
12	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di	91,285	95,875	89,76	N/A	88,6

	Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM).					
13	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan	Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi	Hasil pengukuran terhadap efektifitas koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya yang	87,25	90,71	86,16	N/A	86

	Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal		mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi					
14	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi	Hasil pengukuran terhadap efektifitas koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan serta administrasi dan kesejahteraan rakyat, dalam rangka mendukung bidang unsur Kabupaten Administrasi	87,25	90,71	86,16	N/A	86
15	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di	88,6	90,69	83,34	N/A	88,6

			<p>survey diantaranya adalah urusan yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; serta Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.</p> <p>Unsur Lingkungan Hidup.</p>					
16	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya	88,6	95,37	93,83	N/A	88,6

			adalah urusan yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; serta Urusan Pemerintahan Bidang Sosial. Unsur Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga. Unsur Perpustakaan.					
17	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur	88,6	94.16	91,07	N/A	88,6

			<p>layanan yang di survey diantaranya adalah urusan yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; serta Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.</p> <p>Unsur Kepemudaan dan Olahraga</p>					
18	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di	94,16	93,22	94,16	N/A	88,6

			<p>survey diantaranya adalah urusan yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; serta Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.</p> <p>Unsur Kearsipan.</p>					
19	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya adalah urusan yang dilimpahkan	91,135	90,46	87,30	N/A	88,6

			<p>kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; serta Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.</p> <p>Unsur Kepegawaian.</p>					
20	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	<p>Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya adalah urusan yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan</p>	88,6	90,21	85,86	N/A	88,6

			Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; serta Urusan Pemerintahan Bidang Sosial. Unsur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.					
21	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survey diantaranya adalah urusan yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; Urusan Pemerintahan	92,885	94,54	97,28	N/A	88,6

			Bidang Kearsipan; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; serta Urusan Pemerintahan Bidang Sosial. Unsur Bidang Sosial.					
22	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan. b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan. c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.	100%	100%	100%	100%	N/A
23	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan	3,25	3,25	100%	N/A	N/A

			komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data					
24	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Seruan Gubernur No. 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing	92	95,26	95,52	97,62%	N/A
25	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang.	100%	100%	100%	N/A	N/A
26	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari	Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk	80%	91,38%	87,42%	N/A	N/A

		hasil produksi dalam negeri	dalam negeri (self declare)2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa					
27	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	Terselesaikannya Pemenuhan pengembangan kompetensi 40 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	100%	100%	100%	N/A	N/A
28	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id	100%	100%	100%	N/A	N/A
29	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu	100%	100%	100%	N/A	N/A

			pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).					
30	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.	71%	92,16%	95,83%	93,41%	91%
31	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	N/A
32	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat dikali 100%	100%	96,92%	100%	100%	N/A
33	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD	100%	100%	100%	100%	N/A

	(BPK)	pemeriksaan eksternal (BPK)	dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)					
--	-------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

Analisa Capaian Kinerja

Berdasarkan data pada tabel diatas maka dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi.

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi dengan unsur Kabupaten Administrasi mencakup sejumlah faktor yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan administratif di suatu kabupaten. Ini dapat mencakup responsivitas pelayanan, ketersediaan informasi, efisiensi proses administratif, dan kejelasan aturan. Indeks ini membantu menilai sejauh mana kebijakan dan praktik administratif dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat setempat. Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang unsur Kabupaten Administrasi.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2024 realisasi mencapai 93,105 sedangkan targetnya 89,015 sehingga capaiannya 104,59%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2023 realisasi mencapai 89,02 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 93,105 sehingga ada kenaikan sebesar 4,58%.

- Perbandingan Dengan RPJMD tahun ke-2

Target pada RPJMD tahun ke-2 yaitu sebesar 87,73 sedangkan realisasi pada tahun 2024 sebesar 93,015 sehingga capaiannya sebesar 106,02%.

2. Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi bidang unsur Kecamatan Administrasi.

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi dengan unsur Kecamatan Administrasi mencakup sejumlah faktor yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan administratif di suatu kabupaten. Ini dapat mencakup responsivitas pelayanan, ketersediaan informasi, efisiensi proses administratif, dan kejelasan aturan. Indeks ini membantu menilai sejauh mana kebijakan dan praktik administratif dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat setempat. Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang unsur Kabupaten Administrasi.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2024 realisasi mencapai 93,105 sedangkan targetnya 89,015 sehingga capaiannya 104,59%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2023 realisasi mencapai 89,02 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 93,105 sehingga ada kenaikan sebesar 4,58%.

- Perbandingan Dengan RPJMD tahun ke-2

Target pada RPJMD tahun ke-2 yaitu sebesar 87,73 sedangkan realisasi pada tahun 2024 sebesar 93,015 sehingga capaiannya sebesar 106,02%.

3. Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Kota Administrasi.

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi dengan unsur Kota Administrasi mencakup sejumlah faktor yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan administratif di suatu kabupaten. Ini dapat mencakup responsivitas pelayanan, ketersediaan informasi, efisiensi proses administratif, dan kejelasan aturan. Indeks ini membantu menilai sejauh mana kebijakan dan praktik

administratif dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat setempat. Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang unsur Kabupaten Administrasi.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2024 realisasi mencapai 93,105 sedangkan targetnya 89,015 sehingga capaiannya 104,59%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2023 realisasi mencapai 89,02 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 93,105 sehingga ada kenaikan sebesar 4,58%.

- Perbandingan Dengan RPJMD tahun ke-2

Target pada RPJMD tahun ke-2 yaitu sebesar 87,73 sedangkan realisasi pada tahun 2024 sebesar 93,015 sehingga capaiannya sebesar 106,02%.

4. Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Lingkungan Hidup.

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Lingkungan Hidup melibatkan evaluasi terhadap kebijakan dan upaya pemerintah daerah dalam menjaga, melindungi, dan meningkatkan kualitas lingkungan di kabupaten tersebut. Ini mencakup penilaian terhadap program perlindungan lingkungan, pengelolaan limbah, keberlanjutan sumber daya alam, dan inisiatif pelestarian alam. Indeks ini membantu mengukur sejauh mana pemerintah daerah memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat terkait lingkungan hidup dan keberlanjutan. Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang unsur Kabupaten Administrasi.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2024 realisasi mencapai 93,105 sedangkan targetnya 89,015 sehingga capaiannya 104,59%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2023 realisasi mencapai 89,02 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 93,105 sehingga ada kenaikan sebesar 4,58%.

- Perbandingan Dengan RPJMD tahun ke-2

Target pada RPJMD tahun ke-2 yaitu sebesar 87,73 sedangkan realisasi pada tahun 2024 sebesar 93,015 sehingga capaiannya sebesar 106,02%.

5. Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Kepemudaan dan Olahraga.

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Kepemudaan dan Olahraga mencakup evaluasi terhadap kebijakan dan layanan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pembinaan dan partisipasi pemuda serta pengembangan kegiatan olahraga di kabupaten tersebut. Ini mencakup aspek-aspek seperti penyelenggaraan kegiatan olahraga, fasilitas olahraga, program pembinaan pemuda, dan dukungan terhadap kegiatan positif yang melibatkan kaum muda. Indeks ini membantu mengukur sejauh mana kebijakan administratif dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pemuda serta mendorong partisipasi mereka dalam kegiatan olahraga. Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang unsur Kabupaten Administrasi.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2024 realisasi mencapai 93,105 sedangkan targetnya 89,015 sehingga capaiannya 104,59%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya
Pada tahun 2023 realisasi mencapai 89,02 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 93,105 sehingga ada kenaikan sebesar 4,58%.
- Perbandingan Dengan RPJMD tahun ke-2
Target pada RPJMD tahun ke-2 yaitu sebesar 87,73 sedangkan realisasi pada tahun 2024 sebesar 93,015 sehingga capaiannya sebesar 106,02%.

6. Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Perpustakaan.

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Perpustakaan mencakup penilaian terhadap ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas layanan perpustakaan di suatu kabupaten. Ini melibatkan evaluasi terhadap koleksi buku, fasilitas fisik, layanan informasi, serta inisiatif untuk meningkatkan literasi masyarakat melalui perpustakaan. Indeks ini membantu mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan sumber daya informasi dan mendukung pengembangan literasi di kalangan penduduk setempat. Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang unsur Kabupaten Administrasi.

- Realisasi Capaian vs Target
Pada tahun 2024 realisasi mencapai 93,105 sedangkan targetnya 89,015 sehingga capaiannya 104,59%.
- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya
Pada tahun 2023 realisasi mencapai 89,02 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 93,105 sehingga ada kenaikan sebesar 4,58%.
- Perbandingan Dengan RPJMD tahun ke-2
Target pada RPJMD tahun ke-2 yaitu sebesar 87,73 sedangkan realisasi pada tahun 2024 sebesar 93,015 sehingga capaiannya sebesar 106,02%.

7. Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Kearsipan.

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Kearsipan melibatkan evaluasi terhadap efisiensi, keterbukaan, dan ketersediaan arsip publik. Ini mencakup penilaian terhadap pengelolaan dokumen dan data, sistem penyimpanan, serta kemudahan akses bagi Pegawai untuk mendapatkan informasi arsip. Indeks ini membantu mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat menjaga transparansi, akuntabilitas, dan ketersediaan informasi arsip yang dapat mendukung kebutuhan administratif dan kepentingan publik. Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang unsur Kabupaten Administrasi.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2024 realisasi mencapai 93,105 sedangkan targetnya 89,015 sehingga capaiannya 104,59%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2023 realisasi mencapai 89,02 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 93,105 sehingga ada kenaikan sebesar 4,58%.

- Perbandingan Dengan RPJMD tahun ke-2

Target pada RPJMD tahun ke-2 yaitu sebesar 87,73 sedangkan realisasi pada tahun 2024 sebesar 93,015 sehingga capaiannya sebesar 106,02%.

8. Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Kepegawaian.

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Kepegawaian mencakup evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai pemerintah daerah. Ini melibatkan penilaian terhadap responsivitas, keprofesionalan, dan sikap pelayanan dari aparatur sipil negara di tingkat kabupaten.

Indeks ini membantu mengukur sejauh mana kebijakan dan praktik kepegawaian mendukung terciptanya layanan publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang unsur Kabupaten Administrasi.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2024 realisasi mencapai 93,105 sedangkan targetnya 89,015 sehingga capaiannya 104,59%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2023 realisasi mencapai 89,02 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 93,105 sehingga ada kenaikan sebesar 4,58%.

- Perbandingan Dengan RPJMD tahun ke-2

Target pada RPJMD tahun ke-2 yaitu sebesar 87,73 sedangkan realisasi pada tahun 2024 sebesar 93,015 sehingga capaiannya sebesar 106,02%.

9. Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melibatkan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan terkait pembangunan infrastruktur, tata ruang, dan penataan wilayah di suatu kabupaten. Ini mencakup penilaian terhadap kualitas pembangunan jalan, drainase, taman kota, serta perencanaan perkotaan. Indeks ini membantu mengukur sejauh mana kebijakan administratif dapat menciptakan lingkungan fisik yang nyaman, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan

pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang unsur Kabupaten Administrasi.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2024 realisasi mencapai 93,105 sedangkan targetnya 89,015 sehingga capaiannya 104,59%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2023 realisasi mencapai 89,02 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 93,105 sehingga ada kenaikan sebesar 4,58%.

- Perbandingan Dengan RPJMD tahun ke-2

Target pada RPJMD tahun ke-2 yaitu sebesar 87,73 sedangkan realisasi pada tahun 2024 sebesar 93,015 sehingga capaiannya sebesar 106,02%.

10. Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Sosial.

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Sosial melibatkan evaluasi terhadap Keramahan dan Etika Pelayanan Petugas, Kemudahan Akses Layanan bagi Semua Kalangan, Pemberian Informasi yang Jelas dan Transparan, Kecepatan Respons terhadap Keluhan atau Masukan, Penciptaan Rasa Aman dan Nyaman dan Penyediaan Ruang Dialog atau Partisipasi. Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang unsur Kabupaten Administrasi.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2024 realisasi mencapai 93,105 sedangkan targetnya 89,015 sehingga capaiannya 104,59%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2023 realisasi mencapai 89,02 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 93,105 sehingga ada kenaikan sebesar 4,58%.

- Perbandingan Dengan RPJMD tahun ke-2

Target pada RPJMD tahun ke-2 yaitu sebesar 87,73 sedangkan realisasi pada tahun 2024 sebesar 93,015 sehingga capaiannya sebesar 106,02%.

11. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan.

Indikator kinerja ini membantu mengukur sejauh mana pelayanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat setempat. Evaluasi yang teratur terhadap indikator-indikator ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang efektivitas program dan kebijakan pemerintah setempat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2024 realisasi mencapai 95,875 sedangkan targetnya 91,285 sehingga capaiannya 105,02%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2023 realisasi mencapai 95,52 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 95,875 sehingga ada kenaikan sebesar 0,37%.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Target pada RPJMD tahun ke-2 yaitu sebesar 88,6 sedangkan realisasi pada tahun 2024 sebesar 95,875 sehingga capaiannya sebesar 108,21%.

12. Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi.

Pengukuran Indeks Efektivitas Koordinasi Kabupaten Administrasi melalui indikator-indikator ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja dan efektivitas koordinasi antarunit atau lembaga pemerintah di tingkat kabupaten. Evaluasi terhadap indeks ini penting untuk meningkatkan efisiensi, mengatasi hambatan, dan memastikan tujuan bersama dapat dicapai dengan baik. Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kabupaten Administrasi didapatkan melalui agregat hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi pada bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, serta bidang administrasi, ekonomi, dan pembangunan., dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi, dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2024 realisasi mencapai 90,71 sedangkan targetnya 87,25 sehingga capaiannya 103,96%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2023 realisasi mencapai 87,25 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 90,71 sehingga ada kenaikan sebesar 3,96%.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Target pada RPJMD tahun ke-2 yaitu sebesar 86 sedangkan realisasi pada tahun 2024 sebesar 90,71 sehingga capaiannya sebesar 105,47%.

13. Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi.

Pengukuran Indeks Efektivitas Koordinasi Kabupaten Administrasi melalui indikator-indikator ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja dan efektivitas koordinasi antarunit atau lembaga pemerintah di tingkat kabupaten. Evaluasi terhadap indeks ini penting untuk meningkatkan efisiensi, mengatasi hambatan, dan memastikan tujuan bersama dapat dicapai dengan baik. Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kabupaten Administrasi

didapatkan melalui agregat hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi pada bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, serta bidang administrasi, ekonomi, dan pembangunan., dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi, dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2024 realisasi mencapai 90,71 sedangkan targetnya 87,25 sehingga capaiannya 103,96%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2023 realisasi mencapai 87,25 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 90,71 sehingga ada kenaikan sebesar 3,96%.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Target pada RPJMD tahun ke-2 yaitu sebesar 86 sedangkan realisasi pada tahun 2024 sebesar 90,71 sehingga capaiannya sebesar 105,47%.

14. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan unsur Kepemudaan dan Olahraga.

Pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan bidang unsur kepemudaan dan olahraga. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei minimal 100 orang. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM).

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2024 realisasi mencapai 94,16 sedangkan targetnya 88,6 sehingga capaiannya 106,27%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya
Pada tahun 2023 Realisasi mencapai 87,98 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 94,16 sehingga ada kenaikan sebesar 7,02%.
- Perbandingan Dengan RPJMD
Target pada RPJMD tahun ke-2 yaitu sebesar 88,6 sedangkan realisasi pada tahun 2024 sebesar 94,16 sehingga capaiannya sebesar 106,27%.

15. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan unsur Perpustakaan.

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Perpustakaan membantu mengukur sejauh mana pelayanan perpustakaan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, serta memberikan wawasan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan tersebut. Evaluasi secara teratur terhadap indikator-indikator ini dapat membantu perpustakaan untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pengaruh positifnya dalam mendukung pendidikan dan pembangunan komunitas. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei minimal 100 orang. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi ($25 \times$ Nilai Interval IKM).

- Realisasi Capaian vs Target
Pada tahun 2024 realisasi mencapai 95,37 sedangkan targetnya 88,6 sehingga capaiannya 107,64%.
- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya
Pada tahun 2023 Realisasi mencapai 93,83 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 95,37 sehingga ada kenaikan sebesar 1,64%.
- Perbandingan Dengan RPJMD
Target pada RPJMD tahun ke-2 yaitu sebesar 88,6 sedangkan realisasi pada tahun 2024 sebesar 95,37 sehingga capaiannya sebesar 107,64%.

16. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan unsur Kearsipan.

Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei minimal 100 orang. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi ($25 \times$ Nilai Interval IKM).

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2024 realisasi mencapai 93,22 sedangkan targetnya 88,6 sehingga capaiannya 105,21%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2023 Realisasi mencapai 91,07 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 93,22 sehingga ada kenaikan sebesar 2,36%.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Target pada RPJMD tahun ke-2 yaitu sebesar 88,6 sedangkan realisasi pada tahun 2024 sebesar 93,22 sehingga capaiannya sebesar 105,21%.

17. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Kepegawaian.

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Kepegawaian membantu mengukur sejauh mana kebijakan dan praktik kepegawaian memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi terhadap indikator-indikator ini dapat memberikan pandangan yang komprehensif untuk membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kepegawaian serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem kepegawaian yang ada. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei minimal 100 orang. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi ($25 \times$ Nilai Interval IKM).

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2024 realisasi mencapai 90,46 sedangkan targetnya 88,6 sehingga capaiannya 102,09%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2023 Realisasi mencapai 87,30 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 90,46 sehingga ada kenaikan sebesar 3,61%.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Target pada RPJMD tahun ke-2 yaitu sebesar 88,6 sedangkan realisasi pada tahun 2024 sebesar 90,46 sehingga capaiannya sebesar 102,09%.

18. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang membantu mengukur sejauh mana pelayanan tersebut memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi terhadap indikator-indikator ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang efektivitas dan relevansi kebijakan dan proyek yang dilaksanakan oleh unsur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta membantu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei minimal 100 orang. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM).

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2024 realisasi mencapai 90,21 sedangkan targetnya 88,6 sehingga capaiannya 101,81%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya
Pada tahun 2023 Realisasi mencapai 85,86 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 90,21 sehingga ada kenaikan sebesar 5.06%.
- Perbandingan Dengan RPJMD
Target pada RPJMD tahun ke-2 yaitu sebesar 88,6 sedangkan realisasi pada tahun 2024 sebesar 90,21 sehingga capaiannya sebesar 101,81%.

19. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Bidang Sosial.

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Bidang Sosial membantu mengukur sejauh mana layanan tersebut memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi terhadap indikator-indikator ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang efektivitas dan relevansi kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh unsur Bidang Sosial serta membantu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei minimal 100 orang. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi ($25 \times \text{Nilai Interval IKM}$).

- Realisasi Capaian vs Target
Pada tahun 2024 realisasi mencapai 94,54 sedangkan targetnya 92,885 sehingga capaiannya 101,78%.
- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya
Pada tahun 2023 Realisasi mencapai 97,28 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 94,54 sehingga ada penurunan sebesar 2,81%.
- Perbandingan Dengan RPJMD
Target pada RPJMD tahun ke-2 yaitu sebesar 88,6 sedangkan realisasi pada tahun 2024 sebesar 94,54 sehingga capaiannya sebesar 106,70%.

20. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Bidang Lingkungan Hidup.

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Bidang Lingkungan Hidup membantu mengukur sejauh mana layanan tersebut memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi terhadap indikator-indikator ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang efektivitas dan relevansi kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh unsur Bidang Lingkungan Hidup serta membantu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei minimal 100 orang. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi ($25 \times$ Nilai Interval IKM).

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2024 realisasi mencapai 90,69 sedangkan targetnya 88,6 sehingga capaiannya 102,35%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2023 realisasi mencapai 83,34 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 90,69 sehingga ada kenaikan sebesar 8,8%.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Target pada RPJMD tahun ke-2 yaitu sebesar 88,6 sedangkan realisasi pada tahun 2024 sebesar 94,54 sehingga capaiannya sebesar 102,35%.

21. Persentase Implementasi Rencana Strategi Komunikasi Publik.

Pengukuran persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seluruh dokumen yang menjadi data pendukung tercapainya pelaksanaan Strategi Komunikasi Publik telah dibuat dan diupload kedalam sistem tepat waktu.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini seluruh target kinerja yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja ini pada tahun 2023 capaiannya juga 100%. Sehingga tidak ada perubahan kenaikan atau penurunan capaian.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

22. Nilai Kualitas Data Satu Data Indonesia (SDI).

Pengukuran Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu Aspek Ketepatan Waktu Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal, Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal, Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata dan Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini target untuk tahun 2024 adalah 3,25 dan realisasinya adalah 3,25 sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2023 realisasi mencapai 100% sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 3,25 sehingga tidak ada penurunan atau kenaikan karena capaiannya sama yaitu 100%.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD

23. Survei Kepuasan Layanan Masyarakat.

Survei atas kinerja Walikota/Bupati, Camat dan Lurah yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Seruan Gubernur No. 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing. Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jaksurvei.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini target untuk tahun 2024 adalah 92 dan realisasinya adalah 95,26 sehingga capaiannya 103,54%. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu seluruh kegiatan pada Tahun 2024 telah berjalan lebih baik dan masyarakat mendapatkan pelayanan dengan optimal.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2023 realisasi mencapai 95,52 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 95,26 sehingga ada penurunan sebesar 0,27%.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Target pada RPJMD tahun ke-2 yaitu sebesar 92 sedangkan target pada tahun 2024 sebesar 92 sehingga targetnya tidak ada kenaikan atau penurunan.

24. Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2024 di masing-masing PD/UKPD

Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PD/UKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan. Kepala Perangkat Daerah melaporkan Hasil Inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini target untuk tahun 2024 adalah 100% dan realisasinya adalah 100% sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja ini pada tahun 2023 capaiannya juga 100%. Sehingga tidak ada perubahan kenaikan atau penurunan capaian.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

25. Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Hasil didapat dari jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini target untuk tahun 2024 adalah 80% dan realisasinya adalah 87,42% sehingga capaiannya 109,27%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2023 realisasi mencapai 87,42% sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 91,38% sehingga ada kenaikan sebesar 4.52%.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD

26. Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun.

Hasil didapat dari realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran pada setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta..

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini target untuk tahun 2024 adalah 100% dan realisasinya adalah 100% sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya
Pada tahun 2023 realisasi mencapai 100% dengan target 20 Jam Pelajaran sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 100% dengan target 40 Jam Pelajaran sehingga ada kenaikan sebesar 2 kali lipat untuk jumlah Jam Pelajaran namun untuk persentase capaian tidak kenaikan atau penurunan.
- Perbandingan Dengan RPJMD
Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD

27. Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan.

Terselesaikannya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui <https://km-bpsdm.jakarta.go.id>. Hasil didapat dari realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4).

- Realisasi Capaian vs Target
Pada indikator ini target untuk tahun 2024 adalah 100% dan realisasinya adalah 100% sehingga capaiannya 100%.
- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya
Pada indikator kinerja ini pada tahun 2023 capaiannya juga 100%. Sehingga tidak ada perubahan kenaikan atau penurunan capaian.
- Perbandingan Dengan RPJMD
Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD

28. Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko.

Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai) dengan formula pengukuran [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) /

(Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4)] x 100%.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini target untuk tahun 2024 adalah 100% dan realisasinya adalah 100% sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja ini pada tahun 2023 capaiannya juga 100%. Sehingga tidak ada perubahan kenaikan atau penurunan capaian.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD

29. Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi.

Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini target untuk tahun 2024 adalah 71% dan realisasinya adalah 92,16% sehingga capaiannya 129,80%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja ini pada tahun 2023 capaiannya juga 100%. Sehingga tidak ada perubahan kenaikan atau penurunan capaian..

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD

30. Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur.

Hasil didapat dari jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%.

- Realisasi Capaian vs Target
Pada indikator ini target untuk tahun 2024 adalah 100% dan realisasinya adalah 100% sehingga capaiannya 100%.
- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya
Pada indikator kinerja ini pada tahun 2023 capaiannya juga 100%. Sehingga tidak ada perubahan kenaikan atau penurunan capaian.
- Perbandingan Dengan RPJMD
Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD

31. Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat.

Penyelesaian aduan masyarakat yang masuk via aplikasi CRM dan telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan pengukuran Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat yang masuk.

- Realisasi Capaian vs Target
Pada tahun 2024, jumlah aduan yang masuk sebanyak 22 aduan. Seluruh aduan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang sesuai dengan aturan yang ada. Pada indikator ini seluruh target kinerja yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 99,23%.
- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya
Pada tahun 2023 realisasi mencapai 99,97 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 99,23 sehingga ada penurunan sebesar 0,74%.
- Perbandingan Dengan RPJMD
Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

32. Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK).

Pengukuran kinerja yang menunjukkan sejauh mana rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait temuan hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti oleh instansi terkait dengan metode pengukuran (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat).

- Realisasi Capaian vs Target
 Pada indikator ini target untuk tahun 2024 adalah 100% dan realisasinya adalah 100% sehingga capaiannya 100%.
- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya
 Pada indikator kinerja ini pada tahun 2023 capaiannya juga 100%. Sehingga tidak ada perubahan kenaikan atau penurunan capaian.
- Perbandingan Dengan RPJMD
 Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD

Selain penjabaran perbandingan diatas dan untuk memperkuat data realisasi perbandingan capaian, maka berikut disajikan perbandingan capaian dengan Kabupaten lain di Indonesia untuk Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 3.2 Perbandingan capaian IKU dengan Daerah lain

Indikator Kinerja Utama	Realisasi		
	Kabupaten Adm. Kep. Seribu	Kabupaten Grobogan	Kabupaten Garut
Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten	93,105	N/A	N/A
Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi	90,71	N/A	N/A
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan	95,875	91,05	85,77

Indikator Kinerja Utama	Realisasi		
	Kabupaten Adm. Kep. Seribu	Kabupaten Grobogan	Kabupaten Garut
kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan			
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	92,66	N/A	N/A

Pada tabel di atas disajikan data perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) antara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Garut. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memiliki capaian yang signifikan pada semua indikator yang terukur, sedangkan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Garut hanya menyajikan capaian pada Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan masing-masing dengan nilai 91,05 dan 85,77.

Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten menunjukkan capaian tertinggi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan nilai 93,105 yang menggambarkan tingginya kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Untuk indikator ini, data dari Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Garut tidak tersedia.

Indeks Efektivitas Koordinasi Kabupaten Administrasi menunjukkan bahwa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu meraih capaian tertinggi dengan nilai 90,71 Untuk indikator ini, data dari Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Garut tidak tersedia.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mencatat capaian 95,875, sedangkan data dari Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Garut masing-masing sebesar 91,05 dan 85,77. Hal ini mencerminkan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan pada tingkat lokal di Kecamatan dan Kelurahan.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mencatat capaian sebesar 92,66. Data untuk indikator ini tidak tersedia dari Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Garut.

Capaian Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Tahun 2024 merupakan agregasi dari keempat indikator kinerja utama di atas. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menunjukkan keunggulan signifikan dalam semua aspek yang diukur, yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

Faktor-Faktor Keberhasilan dan Tantangan

Secara umum seluruh IKU telah mencapai target yang ditetapkan, bahkan melampauinya. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai target keempat IKU tersebut. Tantangan tersebut antara lain sebagai berikut, yang pertama Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi yaitu kualitas layanan yang tidak konsisten dan ketidakseimbangan fasilitas dan infrastruktur. IKU yang kedua Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan dengan kendala keterbatasan sumber daya manusia, IKU yang ketiga Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi dengan kendalanya adalah kurangnya komunikasi dan informasi, dan IKU yang keempat adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan kendalanya adalah tidak memberikan edukasi atau sosialisasi yang cukup kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pelimpahan kewenangan sehingga dapat menyulitkan pemahaman mereka terhadap perubahan tersebut. Pada Indikator Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional faktor pendukung keberhasilan dan kendala akan disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Faktor -Faktor Tantangan dan Keberhasilan

Nama Indikator	Tantangan	Faktor Keberhasilan
Indikator Sasaran Khusus		
1. Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Tantangan Teknologi dan Media Sosial	Penyusunan Pesan yang Jelas dan Konsisten
2. Nilai Kualitas Data SDI	Kompleksitas Data yang Tinggi	Koordinasi dengan UP Statistik
3. Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	Representasi Responden Tidak Merata	Kuesioner yang Jelas dan Sederhana
4. Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2024 di masing-masing PD/UKPD	Ketidakpastian Data dan Dokumentasi Awal	Keterlibatan Penuh Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang
5. Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Proses Pengadaan yang Kompleks	Meningkatkan sosialisasi kepada UMKM tentang sertifikasi TKDN dan persyaratan pengadaan
6. Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	Akses server yang sulit pada waktu pelaksanaan	Partisipasi dan Keterlibatan Penuh ASN
7. Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman	Sistem Pengukuran Kinerja yang Efektif
8. Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman	Komitmen Pemimpin dan Manajemen

Nama Indikator	Tantangan	Faktor Keberhasilan
9. Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Tingkat partisipasi dan keterlibatan pihak terkait dalam implementasi program atau proyek rendah, hal ini dapat mempengaruhi nilai kinerja anggaran.	Monitoring dan Evaluasi Berkala
Sasaran Operasional		
1. Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Keterbatasan Sumber Daya	Pengaturan Tindak Lanjut yang Jelas
2. Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Tingkat pemahaman yang rendah terhadap peraturan penyelesaian aduan	Koordinasi dengan Tim yang efektif dan efisien
3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Kompleksitas dalam penyelesaian Tindak Lanjut arahan Gubernur	Koordinasi dengan Tim yang efektif dan efisien

Pemanfaatan Capaian Kinerja Pada Sumber Daya Manusia

Capaian kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Capaian kinerja yang baik dapat memiliki pengaruh positif pada budaya kinerja organisasi. Beberapa pengaruh dari capaian kinerja terhadap budaya kinerja organisasi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan rasa percaya diri dan kepuasan kerja. Capaian kinerja yang baik dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan kerja karyawan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan terhadap organisasi.
2. Mendorong budaya kerja berorientasi hasil dengan Kinerja yang optimal dapat memperkuat fokus organisasi terhadap pencapaian hasil. Karyawan terdorong untuk bekerja lebih efisien dan efektif, dengan tetap menjaga integritas dan kualitas layanan kepada masyarakat.
3. Memperkuat kolaborasi antarunit kerja dengan Kinerja yang baik mendorong terbentuknya pola kerja yang lebih sinergis. Karyawan dan unit kerja saling mendukung, berbagi tanggung jawab, dan bekerja sama untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
4. Menciptakan budaya pembelajaran berkelanjutan dengan capaian kinerja yang baik, organisasi terdorong untuk terus belajar dan beradaptasi terhadap perubahan. Hal ini menciptakan budaya pembelajaran, di mana karyawan berusaha meningkatkan kompetensi dan keterampilan untuk mendukung keberlanjutan kinerja organisasi.
5. Memperkuat akuntabilitas dan transparansi yaitu keberhasilan kinerja mendorong organisasi untuk lebih terbuka dan akuntabel dalam setiap proses yang dijalankan. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, serta memastikan bahwa tata kelola organisasi tetap berjalan dengan baik.
6. Memotivasi inovasi dan kreativitas dengan pencapaian target kinerja mendorong organisasi untuk terus berinovasi dalam menyelesaikan tantangan baru. Budaya inovasi ini menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kreativitas karyawan dalam mencari solusi yang lebih efektif dan efisien.

7. Memperkuat etika kerja dan nilai-nilai organisasi dengan kinerja yang baik dapat memperkuat implementasi nilai-nilai organisasi seperti integritas, profesionalisme, dan pelayanan prima. Dengan begitu, budaya kerja yang beretika dan bertanggung jawab menjadi bagian yang melekat dalam aktivitas sehari-hari organisasi.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Adapun Untuk efisiensi Sumber Daya Anggaran disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 14 sasaran menunjukkan pencapaian sama atau lebih dari 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisiensi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Evaluasi Nilai Efisiensi Anggaran menggunakan acuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Untuk menghitung tingkat efisiensi anggaran digunakan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Batas maksimal nilai efisiensi menggunakan rumus ini adalah 20% dan batas minimal -20%. Untuk mengubah nilai Efisiensi ke skala 0-100%, menggunakan rumus sebagai berikut :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Contoh Perhitungan Nilai Efisiensi untuk Program di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Pagu Anggaran = Rp. 202.442.354.727 Realisasi = Rp. 192.491.681.771 capaian keluaran seluruh program 100%.

$$\text{Efisiensi} = \frac{(202.442.354.727 \times 100\%) - 202.442.354.727}{(192.491.681.771 \times 100\%)} \times 100\%$$

$$= 4,97\% \text{ (Skala -20\% sampai 20\%)}$$

Untuk mencari Nilai Efisiensi skala 0-100%, maka

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{4,97\%}{20} \times 50$$

$$= 62,42\% \quad E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\% \quad EOP = \frac{\sum_{i=1}^n (AAP_{Program_i} \times COP_i) - RA_{Program_i}}{\sum_{i=1}^n (AAP_{Program_i})} \times 100\%$$

Tingkat efisiensi dapat dihitung manakala target sasaran telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak dapat diukur (N/A). Berikut data analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tahun anggaran 2024 pada tabel dibawah.

Tabel 3.4 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan Lingkup Kabupaten Administrasi	100%	89,32%	0,107%
2	Program Penanganan Bencana	Terwujudnya Penanganan Bencana Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	105,26%	88,36%	0,169%

No	Program	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Terkelolanya Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	100%	97,38%	0,026%
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Terwujudnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	107,69%	88,33%	0.194%
5	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Terwujudnya Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	100%	91.07%	0.089%
6	Program Pembinaan Perpustakaan	Terbinanya Perpustakaan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	100.93%	96.23%	0.047%
7	Program Pengelolaan Arsip	Terkelolanya Arsip Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	130%	83.23%	0.368%
8	Program Kepegawaian Daerah	Terwujudnya Aktifitas Kepegawaian Daerah Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	133,33%	100.00%	0.200%
9	Program Pengelolaan Kecamatan	Terwujudnya Pengelolaan Kecamatan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	100%	0.019%	0.021%
10	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Terwujudnya Pengelolaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	107,64%	80.18%	0.275%
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Terwujudnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	100%	94.60%	0.054%
12	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	107,13%	76.15 %	0.310%
13	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	100%	97.27%	0.027%

No	Program	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
14	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	100%	96.63%	0.034%

Penyerapan anggaran pada tabel di atas diperhitungkan berdasarkan penyerapan anggaran Program di mana kegiatan yang mendukung sasaran tersebut berada, atau diperhitungkan secara keseluruhan.

1. Program Penyelenggaraan Jalan

- Kegiatan yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Jalan adalah Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan Subkegiatan Pembangunan Jalan dan Pemeliharaan berkala Jalan. Program ini memiliki Indikator Sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan Lingkup Kabupaten Administrasi.

2. Program Penanganan Bencana

- Kegiatan yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Jalan adalah Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi dengan Subkegiatan Penyediaan Permakanan dan Penyediaan Sandang. Program ini memiliki Indikator Sasaran yaitu Terwujudnya Penanganan Bencana Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

- Kegiatan yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja Program Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) adalah Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi dengan Subkegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Program ini memiliki Indikator Sasaran yaitu Terkelolanya

Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

4. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

- Kegiatan yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan adalah Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi dengan Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi dan Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera. Program ini memiliki Indikator Sasaran yaitu Terwujudnya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

5. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

- Kegiatan yang terkait dengan pencapaian indikator kinerja Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan adalah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi dengan Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi dan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi dengan Subkegiatan Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi. Program ini memiliki Indikator Sasaran yaitu Terwujudnya Pengembangan Daya Saing Keolahragaan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

6. Program Pembinaan Perpustakaan

- Kegiatan yang terkait dengan dengan Program Pembinaan Perpustakaan adalah Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi dengan Subkegiatan Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi dan Pengelolaan dan

Pengembangan Bahan Pustaka. Indikator yang berkaitan adalah Terbinanya Perpustakaan Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

7. Program Pengelolaan Arsip

- Kegiatan yang terkait dengan dengan Program Pengelolaan Arsip adalah Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi dengan Subkegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi dan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi dan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi dengan Subkegiatan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis. Indikator yang berkaitan adalah Terkelolanya Arsip Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

8. Program Kepegawaian Daerah

- Kegiatan yang terkait dengan dengan Program Pengelolaan Arsip adalah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN dengan Subkegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN. Indikator yang berkaitan adalah Terwujudnya Aktifitas Kepegawaian Daerah Lingkup Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

9. Program Pengelolaan Kecamatan

- Kegiatan yang terkait dengan dengan Program Pengelolaan Kecamatan adalah Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi, Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi dan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten. Indikator yang berkaitan adalah Terwujudnya Pengelolaan Kecamatan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

10. Program Pengelolaan Kota Administrasi

- Kegiatan yang terkait dengan dengan Program Pengelolaan Kota Administrasi adalah Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi. Indikator yang

berkaitan adalah Terwujudnya Pengelolaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- Kegiatan yang terkait dengan dengan Program Pengelolaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi adalah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Indikator yang berkaitan adalah Terwujudnya Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

12. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan

- Kegiatan yang terkait dengan dengan Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan adalah Pelaksanaan Tata Pemerintahan dan Kebangsaan. Indikator yang berkaitan adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

13. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- Kegiatan yang terkait dengan dengan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan adalah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan. Indikator yang berkaitan adalah Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

14. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

- Kegiatan yang terkait dengan dengan Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum adalah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban. Indikator yang berkaitan adalah Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Program dan Kegiatan Strategis Yang Menunjang Keberhasilan

Pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terdapat 14 (empat belas) program yang menjadi target pelaksanaan. 7 (tujuh) program merupakan sasaran utama yang memiliki Indikator Sasaran RPJMD. Sedangkan 7 (tujuh) lainnya merupakan program pelimpahan kewenangan. Berikut ditampilkan capaian dari masing-masing program yang mendukung capaian IKU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Tabel 3.5 Program Yang Mendukung Pencapaian IKU Perangkat Daerah

No	Program	Indikator Program	Kinerja Program			Kinerja Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Anggaran/Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/Serapan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan Lingkup Kabupaten Administrasi	4 Indeks	4 Indeks	100%	11.404.502.328	10.186.317.767	89,32%
2	Program Penanganan Bencana	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Lingkup Kabupaten Administrasi	95%	100%	105,26 %	204.501.697	180.696.000	88,36%
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola Lingkup Kabupaten Administrasi	100%	100%	100%	10.490.939.211	10.216.421.127	97,38%

No	Program	Indikator Program	Kinerja Program			Kinerja Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Anggaran/Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/Serapan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Hasil Binaan yang Berprestasi dalam Bidang yang Ditentukan Lingkup Kabupaten Administrasi	65%	70%	107,69 %	241.318.714	213.150.968	88,33%
5	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi Lingkup Kabupaten Administrasi	80%	80%	100%	493.343.485	449.273.548	91,07%
6	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Anggota Kepramukaan yang meningkat kapasitasnya Lingkup Kabupaten Administrasi	14%	14,13%	100,93 %	1.479.336.296	1.423.620.845	96,23%
7	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan Lingkup Kabupaten Administrasi	30%	39%	130%	57.046.969	47.480.062	83,23%
8	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan KORPRI Kabupaten Administrasi	3 indeks	4 indeks	125%	39.000.000	39.000.000	100%
9	Program Pengelolaan Kecamatan	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	4 Indeks	4 indeks	100%	40.935.045.505	40.139.567.418	98,06%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	4 Indeks	4 indeks	100%			
10	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Nilai Efektifitas Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Kabupaten Administrasi	86 Nilai	92,575 Nilai	105,47 %	935.714.371	750.239.130	80,18%
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	4 Indeks	100%	127.851.130.670	120.951.622.303	94,60%

No	Program	Indikator Program	Kinerja Program			Kinerja Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Anggaran/Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/Serapan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
	Daerah Provinsi	Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dalam Kondisi Baik	53,57%	53,57%	100%			
12	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesra	86 Nilai	92,13 Nilai	104,98 %	538.257.970	409.873.200	76,15%
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan	86 Nilai	93,02 Nilai	105,97 %			
13	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	4 Indeks	4 Indeks	100%	7.086.110.790	6.892.527.777	97,27%
14	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	4 indeks	4 Indeks	100%	484.093.108	467.773.130	96,63%

Seluruh Indikator Sasaran tersebut dipantau dan dievaluasi progresnya oleh setiap Unit Kerja dari tingkat Sekretariat sampai dengan Kelurahan yang membidangi urusannya sehingga target bisa tercapai sesuai perencanaan. Dengan menghitung Kinerja Program dan kinerja anggaran kemudian capaian realisasinya dibandingkan dengan target maka didapat efisiensi anggaran sebesar 4,97% di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada tahun 2024. Sedangkan untuk Kegiatan Strategis Daerah pada tahun 2024 seluruhnya berhasil mencapai target sempurna 100%, adapun penjabarannya disampaikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Capaian Kegiatan Strategis Daerah

NO	NAMA KSD	SUB KSD	RENCANA AKSI	KRITERIA KEBERHASILAN	TARGET		CAPAIAN %
1	2	3	4	8		9	10
1	PENANGGULANGAN KEMISKINAN	PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data yang Akurat	Tercapainya target sub kegiatan dan rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat	B03	- 1 Laporan progres pelaksanaan dan pencapaian target sub kegiatan serta rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat (B03)	100%
B06					1 Laporan progres pelaksanaan dan pencapaian target sub kegiatan serta rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat (B06)	100%	

					B09	- 1 Laporan progres pelaksanaan dan pencapaian target sub kegiatan serta rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat (B09)	100%
					B12	- 1 Laporan progres pelaksanaan dan pencapaian target sub kegiatan serta rencana aksi penunjang tahun 2024 oleh Perangkat Daerah yang tercantum di dalam dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2026 berbasis Data yang Akurat (B12)	100%
2	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN DASAR PERKOTAAN	PENATAAN KAWASAN YANG DIKOORDINASIKAN OLEH WALIKOTA/BUPATI	Implementasi Hasil Kajian Penataan Kawasan	Penataan Kawasan Pulau Untung Jawa Catatan: Laporan B06: berfokus pada	B06	B06: Laporan Monitoring dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kepulauan Seribu	100%

				masukan tambahan yang dapat diusulkan dalam APBD Perubahan Laporan B12: berfokus pada pelaporan akhir	B12	B12: Laporan Monitoring dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kepulauan Seribu	100%
3	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN DASAR PERKOTAAN	PENATAAN KAWASAN YANG DIKOORDINASIKAN OLEH WALIKOTA/BUPATI	Penataan RW kumuh sebagai pilot project Penataan Kawasan	Penataan RW Kumuh sebagai Pilot Project di RW 01 Kelurahan Pulau Pari	B06	B06: Laporan Monitoring dan Evaluasi Penataan RW Kumuh sebagai Pilot Project di Kepulauan Seribu	100%
					B12	B12: Laporan Monitoring dan Evaluasi Penataan RW Kumuh sebagai Pilot Project di Kepulauan Seribu	100%

4	PENINGKATAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN DASAR PERKOTAAN	PENATAAN KAWASAN YANG DIKOORDINASIKAN OLEH WALIKOTA/BUPATI	Implementasi Penataan Kawasan Tingkat Kelurahan	Tertatanya 24 Kawasan Tingkat Kelurahan di Kabupaten Administrasi kepulauan Seribu Catatan: Dilaporkan dalam bentuk Nota Dinas kepada Asbang LH dengan tembusan kepada Aspem	B03	B03: Terimplementasikannya Penataan Kawasan Tingkat Kelurahan di 6 Lokasi	100%
					B06	B06: Terimplementasikannya Penataan Kawasan Tingkat Kelurahan di 6 Lokasi	100%
					B09	B09: Terimplementasikannya Penataan Kawasan Tingkat Kelurahan di 6 Lokasi	100%
					B12	B12: Terimplementasikannya Penataan Kawasan Tingkat Kelurahan di 6 Lokasi	100%
5	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL	TRANSFORMASI DIGITAL	Implementasi Manajemen Risiko SPBE Perangkat Daerah	Tersusunnya rancangan final Dokumen Manajemen Risiko SPBE Perangkat Daerah	B12	Rancangan Dokumen Manajemen Risiko SPBE Perangkat Daerah	100%

	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL	PERWUJUDAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DENGAN PREDIKAT A	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 dan 2025	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 dan 2025	B03	Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja (Eselon 2)	100%
					B06	1. Rekap Matriks Peran dan Hasil Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4 dan Jabatan Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 2. Laporan pegawai yang telah menyusun SKP Tahun 2024	100% 100%
					B09	Matriks Rancangan Cascading Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3 dan 4) Tahun 2025 (selesai dan disampaikan kepada Biro Koordinasi pada 31 Juli 2024)	100%
6	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL	PERWUJUDAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DENGAN PREDIKAT A	Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah	B03	Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2023	100%

					B06	1. Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW I Tahun 2024 2. Dokumen evaluasi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Semester I Tahun 2024	100% 100%
					B09	Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW II Tahun 2024	100%
					B12	1. Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah TW III Tahun 2024 2. Dokumen evaluasi Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Semester II Tahun 2024	100% 100%
7	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL	PERWUJUDAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DENGAN PREDIKAT A	Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	Tersusunnya laporan kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu	B03	1. Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 2. <i>Screenshot</i> LKIP telah terupload pada <i>website esr.menpan.go.id</i>	100% 100%

8	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL	PERWUJUDAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DENGAN PREDIKAT A	Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	B09	Laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	100%
9	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL	PENINGKATAN PROFESIONALITAS SDM PEMPROV DKI JAKARTA	Penyusunan Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Tenaga Non ASN Tahun 2025	Tersusunnya Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Tenaga Non ASN Tahun 2025	B03	Laporan Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Tenaga Non ASN PJLP Tahun 2025 sesuai Keppub 1195 Tahun 2022	100%

10	PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL	PENINGKATAN PROFESIONALITAS SDM PEMPROV DKI JAKARTA	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2024	Ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2024	B06	TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2024. Target capaian 90%	100%
				Ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2024	B12	TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2024. Target capaian 95%	100%

Realisasi Anggaran

Secara detail, data Realisasi Kinerja Program dan Serapan Anggaran pada SKPD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Program	Indikator Program	Kinerja Program			Kinerja Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Anggaran/Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/Serapan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan Lingkup Kabupaten Administrasi	4 Indeks	4 Indeks	100%	11.404.502.328	10.186.317.767	89,32%
2	Program Penanganan Bencana	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Lingkup Kabupaten Administrasi	95%	100%	105,26 %	204.501.697	180.696.000	88,36%
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola Lingkup Kabupaten Administrasi	100%	100%	100%	10.490.939.211	10.216.421.127	97,38%
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Hasil Binaan yang Berprestasi dalam Bidang yang Ditentukan Lingkup Kabupaten Administrasi	65%	70%	107,69 %	241.318.714	213.150.968	88,33%
5	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi Lingkup Kabupaten Administrasi	80%	80%	100%	493.343.485	449.273.548	91,07%
6	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Anggota Kepramukaan yang meningkat kapasitasnya Lingkup Kabupaten Administrasi	14%	14,13%	100,93 %	1.479.336.296	1.423.620.845	96,23%

No	Program	Indikator Program	Kinerja Program			Kinerja Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Anggaran/Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/Serapan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
7	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan Lingkup Kabupaten Administrasi	30%	39%	130%	57.046.969	47.480.062	83,23%
8	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan KORPRI Kabupaten Administrasi	3 indeks	4 indeks	125%	39.000.000	39.000.000	100%
9	Program Pengelolaan Kecamatan	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM)	4 Indeks	4 indeks	100%	40.935.045.505	40.139.567.418	98,06%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PPSU	4 Indeks	4 indeks	100%			
10	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Nilai Efektifitas Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Kabupaten Administrasi	86 Nilai	92,575 Nilai	105,47 %	935.714.371	750.239.130	80,18%
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	4 Indeks	100%	127.851.130.670	120.951.622.303	94,60%
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dalam Kondisi Baik	53,57%	53,57%	100%			
12	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesra	86 Nilai	92,13 Nilai	104,98 %	538.257.970	409.873.200	76,15%
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan	86 Nilai	93,02 Nilai	105,97 %			
13	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	4 Indeks	4 Indeks	100%	7.086.110.790	6.892.527.777	97.27%

No	Program	Indikator Program	Kinerja Program			Kinerja Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Anggaran/Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/Serapan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
14	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	4 indeks	4 Indeks	100%	484.093.108	467.773.130	96,63%

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari total 17 Indikator Kinerja Program Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2024, terdapat 9 Indikator Kinerja Program yang realisasinya mencapai 100% (Predikat Interpretasi Sangat Tinggi). Dan terdapat 8 (delapan) indikator kinerja program melebihi target yaitu indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Lingkup Kabupaten Administrasi sebesar 105,26%, Persentase Pemuda Hasil Binaan yang Berprestasi dalam Bidang yang Ditentukan Lingkup Kabupaten Administrasi sebesar 107,69%, Persentase Anggota Kepramukaan yang meningkat kapasitasnya Lingkup Kabupaten Administrasi 100,93%, Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan Lingkup Kabupaten Administrasi sebesar 130%, Indeks Kepuasan Terhadap Layanan KORPRI Kabupaten Administrasi 125%, Nilai Efektifitas Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Kabupaten Administrasi 105,47%, Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesra 104,98% dan Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan 105,97%.

Pada Program Penanganan Bencana, capaian pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana mencapai 105,26%, namun serapan anggaran hanya sebesar 88,36%. Hal ini diakibatkan adanya hasil negosiasi harga saat pengadaan barang. Ini mengindikasikan potensi untuk meningkatkan perencanaan dan implementasi agar anggaran dapat digunakan secara maksimal tanpa mengurangi kualitas hasil.

Pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, persentase pemuda binaan berprestasi mencapai 107,69%, sementara serapan anggaran hanya sebesar 88,33%. Hal ini dikarenakan adanya kegiatan yang tidak terserap yaitu uang saku kegiatan pengiriman peserta kegiatan Jambore Pemuda Jakarta dikarenakan peserta sudah mendapatkan uang saku dari tingkat Provinsi.

Program Pengelolaan Arsip menunjukkan capaian luar biasa dengan ketersediaan arsip siap layan sebesar 130%, namun serapan anggaran hanya sebesar 83,23%. Ini dikarenakan ada tiket kapal yang tidak terserap sehingga serapan anggaran tidak maksimal.

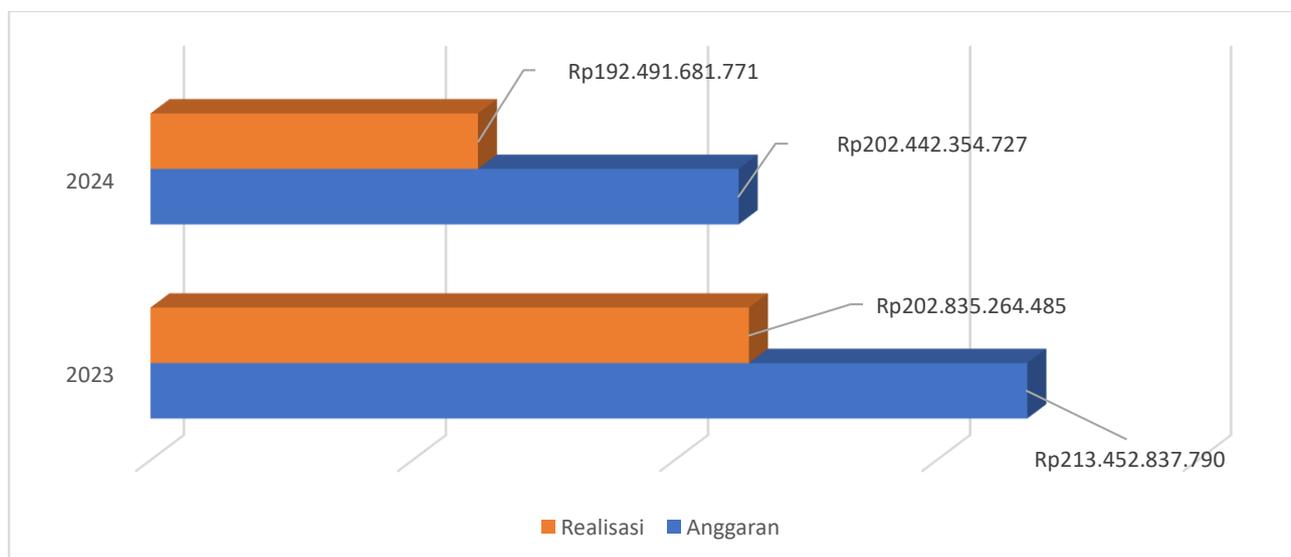
Namun, pada Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengembangan, serapan anggaran hanya mencapai 76,15%. Hal ini dikarenakan beberapa anggaran kegiatan ada yang diefisiensi maka serapan tidak mencapai target yang ditentukan.

Secara keseluruhan, mayoritas program memiliki capaian kinerja yang baik dengan tingkat efisiensi anggaran yang cukup tinggi. Namun, masih terdapat beberapa program yang memerlukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan untuk memastikan serapan anggaran lebih optimal. Hal ini penting untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah, khususnya di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Selanjutnya kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab potensi tidak tercapainya indikator kinerja program (*outcomes*) dan kegiatan (*output*) sampai dengan akhir periode Renstra 2023-2026 antara lain :

1. Memetakan permasalahan-permasalahan yang menjadi penyebab potensi tidak tercapainya indikator kinerja program (*outcomes*) dan kegiatan (*output*) sampai dengan akhir periode Renstra 2023-2026;
2. Menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan pada analisis kebutuhan, data, informasi dan asumsi dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran dan kepatutan serta berdasarkan skala prioritas;
3. Memperhatikan aspek pelaksanaan dan penyerapan atas kegiatan-kegiatan secara maksimal; dan
4. Memperhatikan hal-hal teknis dan administratif setiap kegiatan, anggaran, kode rekening dan komponen belanja yang akan diusulkan dalam Renja.

Pada tahun 2024, anggaran yang diterima ada penurunan dari Tahun 2023 yakni sebesar Rp 202.442.354.727 berikut grafik perbandingannya di bawah ini.



Grafik 3.1. Anggaran dan Realisasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2023-2024

Dari grafik terlihat bahwa alokasi anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp213.452.837.790 dengan realisasi sebesar Rp202.835.264.485, atau mencapai 95,02%. Sementara itu, pada tahun 2024 alokasi anggaran turun menjadi Rp202.442.354.727 dengan realisasi sebesar Rp192.491.681.771, yang mencerminkan capaian sebesar 95,06%. Meskipun persentase realisasi pada tahun 2024 sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023, nominal realisasi anggaran menunjukkan adanya penurunan.

Penurunan nominal anggaran ini dapat diartikan sebagai langkah efisiensi yang dilakukan pemerintah daerah. Namun, penting untuk dicermati apakah penurunan anggaran ini diikuti dengan penurunan target kinerja, sehingga efisiensi yang dilakukan tetap mampu mendukung capaian kinerja yang optimal. Dalam hal ini, efektivitas penggunaan anggaran menjadi poin penting untuk memastikan bahwa penurunan anggaran tidak berdampak pada kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan program strategis.

Selanjutnya, capaian rata-rata realisasi anggaran sebesar 95,06% menunjukkan pengelolaan anggaran yang baik. Namun, adanya sisa anggaran sekitar 4,94% di setiap tahunnya mengindikasikan masih terdapat ruang untuk perbaikan, baik dalam perencanaan

maupun eksekusi program dan kegiatan. Optimalisasi perencanaan anggaran yang lebih matang dan implementasi yang lebih terukur dapat membantu menekan sisa anggaran ini, sehingga setiap alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan.

Selain itu, tren penurunan anggaran yang diikuti dengan konsistensi capaian realisasi juga menunjukkan potensi peningkatan efisiensi. Hal ini perlu didukung oleh pengawasan yang lebih baik terhadap pelaksanaan program, sehingga alokasi anggaran dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan wilayah.

Untuk ke depannya, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu terus meningkatkan efektivitas anggaran dengan memastikan bahwa pengeluaran yang dilakukan benar-benar sejalan dengan target yang ditetapkan. Evaluasi berkala terhadap program yang sudah berjalan, pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan anggaran, serta peningkatan kapasitas SDM di bidang perencanaan dan keuangan akan menjadi faktor kunci untuk mencapai realisasi anggaran yang lebih optimal. Dengan demikian, target kinerja yang telah ditetapkan dapat tetap tercapai bahkan dalam kondisi anggaran yang lebih terbatas.

BAB

4

Penutup

Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Tahun 2024 dapat disimpulkan secara umum telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang terdiri dari 17 (tujuh belas) indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024. Program dan kegiatan Tahun 2024 yang mendukung pencapaian sasaran strategis sebagian besar telah dapat direalisasikan dengan baik.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

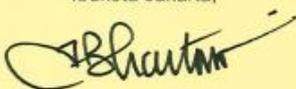
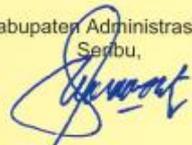
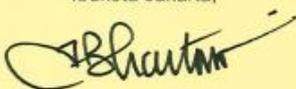
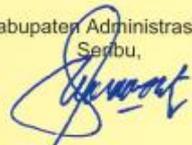
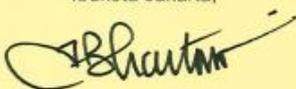
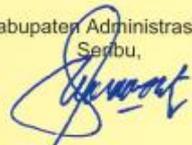
Kesimpulan

Dalam rangka mengevaluasi kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk tahun 2024, terdapat pencapaian yang sangat memuaskan. Secara keseluruhan, nilai capaian Perjanjian Kinerja mencapai 102,15%, mencerminkan komitmen dan dedikasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian ini terdistribusi merata di seluruh aspek kinerja, di mana empat Indikator Kinerja Utama berhasil mencapai capaian rata-rata 103,44%. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa dari tujuh Indikator Sasaran Khusus, sebagian besar mencapai rata-rata capaian 102,03%. Meskipun terdapat sedikit deviasi dari target pada indikator tersebut, pencapaian keseluruhan mencerminkan upaya maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab instansi pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Kesuksesan ini seharusnya menjadi landasan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pencapaian target di masa yang akan datang.

Lampiran-lampiran

Lampiran-lampiran yang dimasukkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024 merupakan komponen penting yang melengkapi dan mendukung informasi utama dalam laporan. Lampiran ini mencakup berbagai dokumen dan data pendukung, termasuk namun tidak terbatas pada Rekapitulasi Anggaran, Grafik dan Diagram, Surat Keputusan atau Peraturan, Dokumen Evaluasi Kegiatan, Bukti Pelaksanaan Program, Rincian Capaian Indikator Kinerja dan Dokumen Pendukung Lainnya.

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2024

 <p>PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA</p> <p>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024</p> <p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : Junaedi Jabatan : Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu</p> <p>selanjutnya disebut Pihak Kesatu</p> <p>Nama : Heru Budi Hartono Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua</p> <p>Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p> <p>Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.</p> <p style="text-align: right;">Jakarta, 2024</p> <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; text-align: center;">Pihak Kedua, Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,  Heru Budi Hartono</td><td style="width: 50%; text-align: center;">Pihak Kesatu, Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,  Junaedi NID 196612051987031003</td></tr></table>		Pihak Kedua, Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,  Heru Budi Hartono	Pihak Kesatu, Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,  Junaedi NID 196612051987031003
Pihak Kedua, Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,  Heru Budi Hartono	Pihak Kesatu, Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,  Junaedi NID 196612051987031003		

Lampiran 2. Penghargaan Universal Health Coverage



Lampiran 3. Penghargaan Abang Jakarta 2024



Lampiran 3. Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2024



Lampiran 4. Dukungan Pemilu terbaik



Lampiran 5. Anugerah Manggala Karya Kencana Tahun 2024



Lampiran 6. Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

